

## ABSTRAK

Otonomi Daerah telah memberikan peluang lebih besar kepada Pemerintahan di daerah untuk dapat menyusun sendiri kebijakan didaerahnya masing-masing salahsatunya adalah Peraturan Daerah (Perda). Sebagai sebuah Kebijakan tentu harapan besarnya adalah lahirnya kebijakan yang baik, responsof dan berlaku efektif di Masyarakat, kebijakan yang dapat menjadi solusi atas persoalan - persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat maupun di pemerintahan itu sendiri,

Sebagai sebuah produk politik terdapat banyak tantangan dan permasalahan didalam Proses Penyusunan sampai dengan pelaksanaan Peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah yang akan dikaji didalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimanakah pengaturan hukum pembuatan Perda Kabupaten/Kota ditinjau dari hukum administrasi negara, bagaimanakah efektifitas pembuatan Perda di kabupaten Deli Serdang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara dan bagaimanakah hambatan pembuatan Perda di kabupaten Deli Serdang dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris (*juridis empiris*) dengan berlandaskan pada teori negara hukum sebagai grand teori bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pembuatan Peraturan Daerah (perda) di kabupaten Deli Serdang apakah sudah benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pembuatan Perda tersebut serta bagaimana solusi yang terbaik agar Perda tersebut dapat terimplementasi untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian menunjukkan kurang efektivitasnya didalam proses pembuatan Peraturan Daerah karena masih ditemukan kurangnya kapasitas dan ketidakseriusan para legislator dalam pembahasan bersama agar Peraturan Daerah tersebut bisa selesai tepat waktu dan tepat guna sehingga bisa diimplementasikan ke masyarakat kabupaten Deli serdang. Kualitas Perda tersebut tidak lepas dari kualitas anggota dewan yang bertugas dalam pembuatan Perda tersebut, semakin baik kualitas anggota dewan tersebut maka akan semakin baik kualitas Perda tersebut.

Kata kuncinya : Efektivitas, Pembuatan Perda, dan implementasi

## ABSTRACTION

Regional Autonomy has provided greater opportunities for regional governments to be able to formulate their own policies in their respective regions, one of which is Regional Regulations (Perda). As a policy, of course the big hope is the birth of policies that are good, responsive, and effective in society, policies that can be a solution to the problems faced by society and the government itself.

As a political product, there are many challenges and problems in the process of drafting until implementing regional regulations as one of the regional legal products that will be studied in this research, how are the legal arrangements for making district regional regulations. Judging from constitutional law, how effective is the making of regional regulations in Deli Serdang district from the perspective of state administrative law and what are the obstacles to making regional regulations in Deli Serdang district and what are the solutions.

This research uses Empirical Legal research methods (*juridical empiric*) based on the theory of the rule of law as a grand theory aimed at finding out and analyzing the effectiveness of making Regional Regulations (perda) in Deli Serdang district, whether they are truly in accordance with applicable regulations and what is obstacles in making this Regional Regulation and what is the best solution so that this Regional Regulation can be implemented for the community

The results of the research show that there is still a lack of effectiveness in the process of making Regional Regulations because there is still a low capacity and lack of seriousness among legislators in joint discussions so that Regional Regulations can be completed on time and effectively so that they can be implemented in the people of Deli Serdang district. The quality of the Regional Regulation cannot be separated from the quality of the council members in charge of making the Regional Regulation, the better the quality of the council members, the better the quality of the Regional Regulation

Key words: Effectiveness, Regional Regulation Making and implementation.